

Pemberdayaan Perempuan Madura: Upaya Peningkatan Keahlian Dan Ketrampilan Para Santriwati Pondok Pesantren Di Bangkalan

S. Anugrahini Irawati

Purnamawati

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Jl. Raya Telang PO BOX 2 Bangkalan Madura

ABSTRACT

Based on research conducted on five Moslem boarding schools for girls in District Bangkalan, it showed that the interest of the Moslem students toward the increase of quality via women empowerment was very high, particularly in developing participation and roles of women in society and national development. There were some occupations or jobs which were wanted and hoped by the Moslem student in development of Bangkalan society such as nursery, teachers, entrepreneurs, civil servants, and housewives. The perspectives of the girl Moslem students in Bangkalan toward the efforts of empowering women is very positive and constructive so that they can actively play roles in society and nation in accordance to the norms and religion principals they leant in Moslem boarding schools. They were very enthusiastic eventhough many obstacles they face such as: lack of skills, economy, knowledge, culture, religion, and family.

Keywords: women empowerment, Moslem boarding schools.

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lima pondok putri yang ada di kabupaten Bangkalan menggambarkan bahwa minat para santriwati di Bangkalan terhadap peningkatan kualitas melalui pemberdayaan perempuan sangatlah tinggi. Ada beberapa jabatan atau pekerjaan yang diinginkan dan diminati para santriwati didalam pembangunan masyarakat Bangkalan seperti, keperawatan, pendidik, pengusaha, pegawai negeri dan ibu rumah tangga.

Pandangan para santriwati di Bangkalan terhadap upaya pemberdayaan perempuan sangat positif dan konstruktif sehingga dapat berperan aktif dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah agama yang telah dipelajari di pondok pesantren. Dalam rangka peningkatan kualitasnya mereka sangat antusias namun banyak kendala-kendala yang harus dihadapi antara lain: kemampuan (skill) terbatas, ekonomi, pengetahuan, budaya, agama dan lingkukeluarga

Kata kunci : pemberdayaan perempuan, pondok pesantren.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian perubahan yang dilakukan secara menyeluruh, terarah dan berencana dalam rangka mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kebutuhan lahiriah dan batiniah, maka pembangunan nasional hendaknya mengacu pada konsep pembangunan yang utuh, menyeluruh dan melibatkan peran aktif seluruh masyarakat. Tanpa adanya peran aktif masyarakat, maka pembangunan nasional akan mengalami hambatan dan bahkan kegagalan.

Akhir-akhir ini tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan frekuensi yang meningkat, namun

keikutsertaan perempuan dalam pembangunan kelihatannya masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pada kondisi memprihatinkan yang melilit perempuan, yang mana perempuan masih dianggap memiliki status dan kedudukan yang rendah dalam kehidupan masyarakat (Saptari, 1997: 7). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan CETRO divisi Perempuan dan Pemilu bahwa perempuan Indonesia yang mewakili kaum perempuan di dalam lembaga politik formal secara keseluruhan masih sangat minim yaitu hanya sebesar 7,4 %. Sebagai gambaran secara kongkrit keadaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1, yang disajikan di bawah :

Tabel 1.1. Keterwakilan Perempuan Indonesia dalam Lembaga Politik Formal
(Table 1.1 . Women Participation on Political Indonesia)

Lembaga	Perempuan		Laki-laki		Jumlah (100 %)
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
MPR	18	9,2	177	90,8	195
DPR	45	9	455	91	500
MA	7	14,8	40	85,2	47
BPK	0	0	7	100	7
DPA	2	4,4	43	95,6	45
KPU	2	18,1	9	81,9	11
Gubernur (DATI I)	0	0	30	100	30
Bupati (DATI II)	5	1,5	331	98,5	336
Eselon I-III	1.883	7	25.110	93	26.993
Hakim	536	16,2	2.775	83,8	3.311
PTUN	35	23,4	150	76,6	185
Total	2.533	7,4	31.752	92,6	34.285 (100)

Sumber : Data diolah oleh Divisi Perempuan dan Pemilu CETRO, 2002

Pada Tabel 1 diatas memberikan gambaran bahwa masih minimnya perempuan Indonesia yang mewakili kaum perempuan di dalam lembaga politik formal secara keseluruhan hanya sebesar 7,4%. Secara absolut, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Gejala jumlah perempuan yang mewakili kaum perempuan yang menduduki dalam lembaga-lembaga pemerintah lebih sedikit dibanding laki-laki tersebut diduga karena

adanya diskriminasi dalam pola pemberdayaannya.

Tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya akses terhadap informasi menyebabkan perempuan menjadi rentan terhadap berbagai krisis yang terjadi, baik ekonomi maupun sosial. Perempuan masih terbelenggu dalam kondisi diskriminatif antara laki-laki dan perempuan (gender). Akibatnya, angka buta huruf dikalangan perempuan cukup tinggi, pengangguran

dan upah yang diterima pekerja perempuan cukup rendah bila dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karenanya untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender maka perlu adanya pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan melalui kegiatan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi jender.

Lies Markus: "Wajah kemiskinan adalah wajah perempuan. Jadi pemberdayaan kaum miskin otomatis merupakan pemberdayaan kaum perempuan". Hal ini mempunyai makna bahwa: pertama, pemberdayaan kaum miskin itu harus menasar kepada kaum perempuan. Yang kedua, karena secara sosial tanggung jawab kesehatan, pendidikan anak-anak, itu masih dibebankan kepada perempuan. Mungkin nanti lain halnya jika tanggung jawab itu sudah dibebankan secara sosial kepada kaum laki-laki dan laki-laki secara seimbang, pemberdayaannya bisa berbeda kembali. Tapi saat ini secara praktis memang yang bertanggung jawab atas makanan, kesehatan atau pendidikan terutama yang paling dasar adalah perempuan. "Sering dikatakan dalam statistik dunia kalau kita menolong satu orang perempuan, berarti bantuan itu menolong empat anggota keluarga. Jika ingin mengakhiri kemiskinan harus melalui tangan perempuan, karena justru wajah kemiskinan adalah wajah perempuan, yang kedua karena dari segi matematis dia bisa menolong atau bisa membantu empat kali lipat daripada diberikan kaum lelaki."

Selanjutnya Dita Indah Sari menyebutkan, mahalnya biaya pendidikan adalah malapetaka, karena membuat kelompok perempuan menjadi sangat rendah daya tawarnya serta rentan akan tindak kekerasan dan ketidakadilan. Sebagai contoh, dari bulan Januari-April 2004, hanya 10,75% TKI kita yang ditempatkan di sektor formal di luar negeri. Selebihnya,

yaitu 89,25% terdampar ke sektor informal. Di sektor informal ini, 93,5%-nya adalah buruh migran perempuan, yang mayoritas bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dengan hanya 14,9% perempuan yang lulus SMA, dan 2,8% lulus Diploma dan Strata 1-3, maka 83% perempuan Indonesia hanya mengantongi ijazah SMP, SD atau malah tidak berijazah sama sekali alias tidak pernah sekolah. Selain putus sekolah akibat tidak mampu membayar biaya sekolah, motivasi anak-anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan juga dihambat oleh konservatisme keluarga yang patriarkis, dimana anak laki-laki yang harus diprioritaskan.

Dengan kualifikasi semacam ini, jangan harap kaum perempuan bisa memiliki kesetaraan posisi tawar di pasar tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri. Lalu, pada saat yang bersamaan, para pengusaha dan pemerintah mengeluhkan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja kita, dibandingkan buruh-buruh di Vietnam atau Cina, sebagai salah satu faktor yang membuat Indonesia tidak kompetitif. Ini merupakan pernyataan lempar batu sembunyi tangan, karena policy ekonomi pemerintahlah yang menciptakan situasi ini, ditambah kebijakan upah murah yang membuat buruh sukar meningkatkan skill-nya. Di dalam negeri pun, 70% tenaga perempuan bekerja di sektor informal (44%-nya adalah pembantu rumah tangga), yang rendah keterampilan, minim upah serta tanpa perlindungan hukum.

Kondisi perempuan di atas juga dirasakan dalam kehidupan perempuan Madura. Dimana keterbelakangan perempuan Madura telah menempatkan posisi perempuan pada posisi yang lemah. Akibatnya, akses dan partisipasi perempuan Madura dalam bidang pembangunan politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan kesehatan mengalami kemerosotan. Hal ini

dapat kita lihat keikutsertaan perempuan empat (4) Kabupaten yang ada di Pulau Madura dalam dewan legislatif (DPRD) di Madura digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Keterwakilan Perempuan Madura Dalam Lembaga DPRD
(Table 1.2.. Madura Women Participation on DPRD)

Kabupaten	Perempuan		Laki-laki		Jumlah Anggota DPRD (100 %)
	Caleg	Anggota DPRD	Caleg	Anggota DPRD	
Bangkalan	70	2	263	43	45
Sampang	26	0	308	45	45
Pamekasan	42	0	308	45	45
Sumenep	78	2	363	43	45
Jumlah	216	4	1.242	176	180(100)

Menurut Usman (1998) kurangnya wanita menempati posisi-posisi kunci dalam organisasi politik (badan legislatif maupun birokrasi pemerintahan) disebabkan oleh *innate human tendencies* atau karakteristik personal dan aspek organisasional, terutama sebagai konsekuensi dari perjanjian-perjanjian sosial yang melembaga dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat kita, perjanjian sosial yang mengatur peranan tersebut masih dibingkai oleh sebuah sistem yang lazim disebut *patriarchal*, yaitu: *Pertama*, suatu mekanisme yang lebih banyak menempatkan kaum pria pada peran yang lebih dominan. *Kedua*, faktor kemauan/keinginan, *Ketiga*, faktor iklim yang tidak kondusif.

Bila kondisi ini dibiarkan begitu saja, maka perempuan yang diharapkan sebagai elemen penting untuk berperan aktif dalam pembangunan akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya terpadu dalam rangka memberdayakan perempuan dalam upaya peningkatan kualitas perempuan di Madura, baik dalam bidang pendidikan, politik, sosial, ekonomi, hukum, ketenaga kerjaan, kesehatan, dan lain-lain.

Masyarakat Madura yang sangat kental dengan ikatan religius Islam-nya, memandang perempuan sebagai tiang negara yang memiliki nilai strategis dalam

kehidupan suatu bangsa. Pada tangan perempuanlah suatu negara akan baik, dan pada perempuan pula suatu negara akan runtuh. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki peran besar dalam kehidupan keturunan mereka sebagai penerus bangsa. Pendidikan, pembinaan moral dan akhlak anak merupakan bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi kaum perempuan dalam kehidupan rumah tangganya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori struktural fungsional

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri dari berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengklasifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut bekerja di dalam masyarakat.

Dahrendorf, menyebutkan bahwa teori ini menganut beberapa prinsip, antara lain suatu masyarakat adalah suatu kesatuan dari berbagai bagian. Sistem sosial senantiasa terpelihara karena mempunyai perangkat dan mekanisme kontrol, perubahan terjadi secara berangsur-angsur dan integrasi sosial dicapai melalui kesepakatan

an mayoritas anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai (dalam Undsey, 1990 : 39).

Harmoni dan stabilitas dalam suatu masyarakat, menurut teori ini sangat ditentukan oleh efektifitas konsensus nilai-nilai. Sistem nilai senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat. Meskipun konflik dan masalah sewaktu-waktu bisa muncul, tetapi tetap dalam batas yang wajar dan bukan ancaman yang bakal merusak sistem sosial. Boserup E, (1984) menyebutkan hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih sebagai hubungan pelestarian keharmonisan daripada bentuk persaingan.

Dalam hal peran gender, pengikut teori ini menunjukkan masyarakat pra industri sebagai contoh, betapa masyarakat tersebut terintegrasi dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggungjawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat seperti ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh jenis kelamin.

Para penganut teori ini berpendapat bahwa teori struktural fungsional tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Selanjutnya teori ini menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah wajar. Suami-ayah mengambil peran instrumental, membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan jalan menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan dan menjadi

penghubung keluarga dengan dunia luar. Sementara itu, ibu-isteri mengambil peran ekspresif (*expressive role*), membantu mengentalkan hubungan, memberikan dukungan emosional dan pembinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga, serta menjamin kelancaran urusan rumah tangga. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan lainnya, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidak seimbangan. Teori fungsionalisme berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan di dalam suatu masyarakat. Keseimbangan itu dapat terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu pada posisi semula. Dengan kata lain, kerancuan peran gender menjadi unsur penting dalam suatu perceraian.

Salah satu kritik yang dilontarkan pada teori ini ialah bahwa teori ini terlalu terikat pada kenyataan masyarakat pra-industri. Padahal, struktur dan fungsi di dalam masyarakat kontemporer sudah banyak berubah. Keluarga dan unit rumah tangga telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian. Kalau dahulu sistem masyarakat lebih bersifat kolektif, dan keluarga pun masih bersifat keluarga besar. Tugas dan tanggung jawab keluarga dipikul secara bersama-sama oleh keluarga tersebut. Masalah anak tidak hanya diurus oleh ibunya, tetapi oleh semua anggota keluarga yang ramai tinggal di rumah tersebut. Lain halnya dengan keadaan masyarakat sekarang ini, di mana keluarga inti semakin meluas di dalam masyarakat dan sudah menjadi salah satu ciri masyarakat modern.

Sehubungan dengan perubahan struktur keluarga di atas, menarik untuk diperhatikan penelitian Nye (1976: 16) yang membagi opini masyarakat terhadap fungsi dan peran suami-isteri kepada lima kelompok,

yaitu; 1) segalanya pada suami; 2) suami melebihi peran isteri; 3) suami dan isteri mempunyai peran yang sama; 4) peran isteri melebihi suami, 5) segalanya pada isteri. Apa yang dikemukakan Nye di atas, selain menunjukkan betapa besar perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, juga menunjukkan betapa besar tantangan teori ini di masa mendatang. Pembagian fungsi dan peran antara suami isteri dianggap sulit dipertahankan dalam konteks masyarakat modern. Dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan, peran seorang laki-laki banyak mengacu pada norma-norma kebiasaan yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan tetapi ditentukan oleh daya saing dan keterampilan. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpeluang untuk memperoleh kesempatan dalam persaingan.

Teori kekuasaan dan status

Banyak pakar yang memberikan komentar terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan yang menjelaskan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dan status lebih tinggi daripada perempuan. Diantara pakar tersebut adalah Chodorov yang mengemukakan bahwa relasi kekuasaan dan status ini dijadikan dasar dalam menentukan relasi gender. Tidak heran kalau dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan dianggap wajar dalam masyarakat. Perempuan dinilai berpenampilan dan berperilaku lemah lembut, sementara laki-laki berpenampilan dan berperilaku tegas, jantan, dan karenanya memiliki kekuasaan dan status lebih besar (dalam Tavris, 1992 : 17).

Teori kekuasaan dan status ini berpengaruh secara *universal* di dalam masyarakat. Tidak sedikit kebijakan dan peraturan lahir di atas persepsi tersebut dan

tidak heran kalau di dalam masyarakat muncul ideologi gender yang berupaya meninjau secara mendasar berbagai kebijakan dan peraturan yang dinilai tidak berwawasan gender. Dengan demikian maka perempuan masih dinomorduakan dapat menempati posisi-posisi yang strategis dalam masyarakat.

Teori komunikasi non-verbal

Komunikasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam suasana apa yang disebut Henley sebagai kemampuan kurang (*less powerful*) bagi perempuan dan kemampuan lebih (*more powerfull*) bagi laki-laki. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk menegur sapa kepada perempuan. Karena perempuan dinilai memiliki kekuasaan yang tidak memadai, maka masyarakat laki-laki cenderung memandang rendah terhadapnya.

Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-hati, sementara laki-laki dengan otoritas yang dimilikinya menampilkan diri secara terbuka. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk melakukan reaksi lebih awal terhadap perempuan dan tidak sebaliknya. Situasi seperti ini sangat berpengaruh di dalam relasi gender, karena dengan demikian skor laki-laki akan lebih unggul dalam menentukan norma dalam masyarakat.

Norma-norma yang dijadikan ukuran dalam menentukan lazim atau tidaknya sesuatu adalah norma yang ditentukan oleh laki-laki. Hal ini menurut Tavris disebabkan laki-laki dianggap manusia normal, sedangkan perempuan dianggap manusia abnormal. Akibatnya, kata Tavris perempuan bukan saja menerima status subordinasi tetapi terjadi feminisasi kemiskinan dan maskulinisasi kekayaan.

Teori pembagian kerja

Relasi kuasa dan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar pula pada pembagian lapangan kerja. Kalau dalam masyarakat tradisional dikenal pembagian kerja secara seksual, laki-laki sebagai pemburu, dan perempuan sebagai pengasuh, maka hal yang sama masih juga dijumpai dalam masyarakat modern. Misalnya dalam dunia bisnis, perempuan diarahkan menjadi sekretaris dan laki-laki pemimpin. Dalam dunia sains perempuan sebagai operator laboratorium, sedangkan laki-laki sebagai saintis. Urusan produktif seolah-olah menjadi urusan laki-laki dan urusan reproduksi dan kerumaha-tanggaan adalah tugas perempuan. Masih selalu menjadi perdebatan panjang mengapa pembagian kerja tetap saja tidak bisa menghilangkan pengaruh faktor perbedaan biologis.

Teori pembagian kerja ini terlihat pula dalam peran dan kedudukan perempuan dalam berbagai organisasi. Menurut Tavris, ketimpangan peran gender di dalam berbagai organisasi disebabkan karena perempuan mempunyai keterbatasan, bukan saja karena secara alami laki-laki menurut teori struktural fungsional dipersepsikan sebagai kaum yang lebih unggul, atau berbagai stereotip gender lainnya, tetapi juga karena perempuan ditemukan kurang terampil daripada laki-laki. Dalam kendali organisasi, posisi perempuan lebih mengkhawatirkan daripada laki-laki, sehingga dalam pola relasi gender masih sering kali terjadi ketimpangan (Tavris, 1992: 52).

Disadari atau tidak, belum adanya pemberdayaan yang terarah bagi perempuan di Madura menyebabkan keterbelakangan yang berkepanjangan yang dialami kaum perempuan. Oleh karenanya, penanganan dan penanggulangan terhadap hal ini memerlukan strategi dan wacana yang tepat, sehingga mampu mem-

berikan alternatif pemecahan terhadap berbagai persoalan yang dialami oleh perempuan. Melalui berbagai penambahan keahlian dan ketrampilan diharapkan dapat membantu upaya melepaskan perempuan Madura dari keterkungkungan, keterbelakangan, dan beberapa hal lain, yang telah menyebabkan mereka berada pada posisi *marjinal* bila dibandingkan dengan perempuan daerah lain yang ada di Indonesia.

Jenis penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa field research dan memakai dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologis-empiris dan pendekatan religius. Pendekatan ini digunakan agar para peneliti lebih dekat dengan masyarakat yang dikenal religius, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan valid.

METODE

Sampel dan jenis data

Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dipungut dari masyarakat. Untuk data primer diambil dari responden secara purposif yang berjumlah 100 orang santriwati yang tersebar di beberapa pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data juga terbagi pada dua macam (data primer dan data sekunder). Untuk data primer teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (*interview*) dan kuesioner, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui teknik studi dokumen berupa penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen lain yang dapat

mendukung penelitian ini lebih menuju sempurna.

Analisis Data

Mengingat hampir semua data bersifat kualitatif, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini juga bersifat analisis kualitatif. Data-data dari kuesioner ditabulasi untuk dikategorikan kemudian dihitung distribusi frekuensinya dan ditampilkan dengan table-table tunggal maupun ganda, dimana dalam table tersebut tersebut akan dibandingkan antara anggota santriwati pondok yang satu dengan yang lain. Berdasarkan tabel-tabel tersebut maka akan dapat menganalisis untuk memecahkan permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pesantren Putri di Indonesia

Pandangan secara umum ketika kita berbicara tentang pesantren bahwa pesantren haruslah dipahami sebagai suatu lembaga pendidikan yang berbasis pada pendidikan keagamaan (*tafaqquh fiddiin*), demikian juga bagaimana pandangan kita terhadap pesantren putri. *Tafaqquh fiddiin* ini pada dasarnya meliputi pengetahuan dan juga sekaligus pengalaman seluruh perangkat keagamaan, mulai dari bagaimana melaksanakan ibadah hingga mu'amalah sehari-hari yang berkaitan dengan masalah ibadah. Pada dasarnya pengetahuan agama dalam pesantren dalam perspektif pesantren manapun juga, adalah pengetahuan keagamaan salaf, yang dilesarkan berdasarkan tradisi dan ajaran ulama klasik (abad VII-XII), khususnya dalam ajaran fiqh karena perannya sebagai acuan yang hampir-hampir baku terutama dalam praktek-praktek keagamaan sehari-hari. Ilmu fiqh inilah yang pada dasarnya menjadi penentu ciri khas suatu pesantren,

yang mayoritas menganut paham fiqh mazhab, khususnya mazhab syafi'i.

Pesantren biasanya mengakui dan membakukan kitab-kitab fiqh yang dikenal dengan al kutub *al mi'tabarah*, yang disepakati dianggap otoritatif dan diakui dilingkungan pesantren. Ada beberapa tingkatan kitab-kitab fiqh yang diajarkan dipesantren sesuai ketentuan praktisnya. Pada tingkatan permulaan digunakan kitab fiqh ringkas yang sangat peraktis, khususnya dalam hal ibadah. Tingkatan menengah, masih tingkatan praktis baik di bidang ibadah dan mu'amalah. Lalu tingkatan tinggi, yang telah merambah pada *fiqh* perbandingan (*muqaran*) plus pengetahuan *ushul fiqh* dengan metode *istinbathnya*, baik *qaul taqrir jama'i*, *ilhaqi* dan *manhaji*. Namun, didalam pesantren putri, fiqh yang dipelajari biasanya hanya sampai tingkat menengah.

Disamping pengajaran fiqh, pesantren putri sangat ketat, dalam menerapkan ajaran fiqh, atau lebih jelasnya ajaran salaf. Ini tercermin dalam disiplin dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan jam-jam pelajaran yang hampir lepas dari pengawasan pengurus maupun pengasuh. Pembatasan untuk sosialisasi, baik sesama putri atau putra maupun dengan masyarakat luas seluruhnya dimaksudkan sebagai pendidikan implementasi moral salaf tersebut. Kalau kita berbincang dengan santri putri, biasanya masalah ini menjadi masalah ini menjadi peranan utama mereka. Sebagian besar pesantren di Indonesia, sekolah-sekolah islam masih dipisah antara kelas putra dan kelas putri. Bahkan pemisahan kelas ini masih terjadi di perguruan tinggi (yang ada dilingkungan pesantren). Kalau di tingkat SD-SMP-SMU islam, pemisahan pada jam (putra pagi dan putri sore), juga di perguruan tinggi kedua manusia dengan jenis kelamin yang berbeda itu dipisahkan dengan tabir.

Asrama santri putri biasanya lebih tertutup dibandingkan asrama putra. Dibeberapa pesantren puteri masih diberlakukan sensor surat dan telepon, atau larangan menggunakan telpon seluler. Semua itu merupakan penerapan moral salafi, dalam hal ini dalam bab aurat dan mahram. Pemahamannya, semua yang ada pada diri perempuan adalah aurat, dari tubuh hingga suara, bagi orang laki-laki yang bukan mahramnya. Karena itu gagasan untuk membuat pesantren putri yang sama sekali terpisah dari pesantren dan komunitas laki-laki diterima oleh umumnya orang tua santri. Pesantren Gontor putri (Jatim) atau Diniyah putri (Padang Panjang) merupakan contoh dari pola ini, kita bisa melihat bagaimana penerimaan masyarakat yang luar biasa antusias untuk menerapkan pola pendidikan sesuai dengan tuntunan islam.

Tentunya masyarakat menerima kondisi ini sebagai "keharusan" di mana perempuan terus mempunyai bekal 'moral standar' dalam kehidupan mereka selanjutnya. Moral standar ini diperlukan, karena disadari bahwa kaum putri nantinya akan meninggalkan pesantren untuk melanjutkan dalam kehidupan masyarakat umum. Ada yang melanjutkan pelajaran keperguruan tinggi, bagi orang tua yang mempunyai cukup biaya, kemampuan dan kemauan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Tapi ada yang langsung hidup 'tenggelam', dalam kehidupan rumah tangga. Kebanyakan karena keterbatasan sosial ekonomi orang tua mereka atau bahkan memang mereka menghendaki kedupan yang mau tidak mau harus masuk kedalamnya. Survei kecil-kecilan yang kami buat menunjukkan fenomena menggembirakan, bahwa lebih 50% alumni pesantren putri melanjutkan keperguruan tinggi. Selebihnya tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi, tetapi tidak langsung berumah tangga, melainkan bekerja.

Ada banyak hal yang harus dipikirkan dalam kaitan fenomena ini, yang akan kita bahas selanjutnya.

Perguruan tinggi yang menyerap alumni santri putri saat ini sudah beragam, tidak hanya IAIN, Sekolah Tinggi bahkan universitas juga. Belum ada jumlah yang bisa ditampilkan untuk menggambarkan figur alumni pesantren putri ini secara khusus. Tetapi diduga, santri putri yang orang tuanya mempunyai kemauan dan kemampuan secara ekonomi, akan cenderung melanjutkan keperguruan tinggi umum dari pada IAIN atau perguruan tinggi agama yang ada dipesantren. Sebabnya tentunya bermacam-macam tergantung pada kemauan dari masing-masing santriwati tersebut. Tapi yang ingin kita soroti sedikit adalah dampaknya pada konservatisme keagamaan dalam fenomena ini. Dugaan sementara tentang kondisi dibawah ini perlu dikonfirmasi lagi kebenarannya berdasarkan fakta di lapangan.

Santri putri yang kemudian melanjutkan keperguruan tinggi agama (seperti IAIN dulu) mempunyai kesempatan mengembangkan wawasan metodologinya, meskipun tak terlalu sistematis. Maksudnya, fiqh (dan moral) salafi yang diperoleh dari pesantren sedikit demi sedikit mengalami pencerahan metodologis, tapi tidak langsung keinti ajarannya. Nalar keagamaan IAIN pun sebetulnya masih kurang benar tetapi karena ada tambahan dari metodologi ilmu-ilmu sosial dan kesejarahan, maka dengan sendirinya kesalafan itu lebih bisa berkembang kearah yang lebih maknawi- misalnya anak-anak IAIN menembus kebuntuan metodologi *ushul salafi* dengan metodologi *ushul* yang lebih menekankan pada *maqashid*. sehingga muncul pemikiran-pemikiran keagamaan juga moralitas keagamaan yang lebih progresif, kontekstual dengan tuntutan mereka.

Hal ini berbeda dengan santri putri yang meneruskan keperguruan tinggi umum, karena mereka tidak mendapatkan pengetahuan keagamaan yang lebih lanjut, maka pengetahuan dan juga moralitas mereka tetap pada kesalafan awal yang menjadi keharusan. Bahkan cenderung lebih konservatif. Seorang peneliti menemukan fenomena menarik, soal ini, ketika melihat bahwa kebanyakan pemangsa (konsume), buku-buku kecil mirip pamflet terjemahan dari timur tengah yang mendomestifikasi perempuan dengan alasan-alasan keagamaan adalah putri-putri 'solehah' yang kuliah diperguruan tinggi umum. Jenis buku ini tidak laku dikalangan putra-putri IAIN. Yang menarik lagi, buku-buku pamflet itu hampir seluruhnya ditulis laki-laki, dan diterbitkan oleh penerbit yang penerjemah dan editornya juga laki-laki, secara gampang peneliti itu menyimpulkan, kaum putri solehah itu telah tanpa sadar didomestifikasi - atau mendomestifikasi diri - dengan membeli dan membaca pamflet itu. Domestifikasi itu adalah kepentingan laki-laki yang "lahan" pekerjaannya akan terancam dengan banyaknya dokter perempuan, insinyur perempuan, hakim perempuan. Wallahu a'lam.

Ada baiknya kita menengok kembali sejarah pesantren putri. Mengenai sejarahnya, barang kali kita akan mafhum mengenai evolusi pesantren putri. Pesantren bagi putri mungkin baru muncul sekitar akhir tahun 1920-an atau awal 1930-an. Ada sedikit cerita dari Gus Dur, mengenai usaha Kiayi Bisri Syamsuri (Denanyar Jombang) menerima santri putri pondoknya. Ketika itu belum lazim pesantren bisa menerima putri dipondoknya. Ketika Kiayi Hasyim akan berkunjung ke Denanyar. Kiayi bisri buru-buru menyembunyikan santri putri supaya tidak ketahuan kiayi Hasyim. Rupanya waktu itu soal ini masih jadi ikhtilaf. Menjadi dalam bahtsul masail dalam tahun

1920-an/awal 1930-an. Persoalan perempuan masih menjadi misteri tersendiri. Saya menangkap kesan, laki-laki ketika itu masih penasaran dan begitu besar rasa penasaran itu. Jenis makhluk apakah perempuan itu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan disekitar perempuan adalah tercetuskan seperti: bolehkah perempuan mempelajari sesuatu selain al Qur'an?, bolehkah perempuan belajar berhitung?, bolehkah perempuan naik sepeda, bolehkah perempuan mendatangi kegiatan keagamaan, bolehkah laki-laki memulai salam kepada perempuan, bolehkah laki-laki melihat telapak tangan dan wajah perempuan lain (bukan mahram)?. Tetapi untuk lebih adil, juga bolehkah memungut uang bayaran sekolah? (sebagian pertanyaan-pertanyaan bisa dilihat dalam kumpulan Bahtsul Masail Diniyah. Hasil Mukhtamar dan Munas ulama-ulama NU, yang dikumpulkan oleh KH. A. Aziz Masyuri, tahun 1997).

Pemberdayaan Santriwati di Bangkalan

Kondisi pesantren yang pada umumnya beraliran klasik demikian juga terjadi pada kondisi-kondisi pesantren di Bangkalan khususnya kondisi pesantren putri yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sebenarnya kondisi ini menuju pada model pesantren tradisional atau salaf, dimana pesantren tradisional merupakan salah satu lembaga pendidikan islam yang sangat diperhitungkan mempersiapkan ulama pada masa depan sekaligus sebagai garda terdepan dalam memfilter dampak negative dari pengaruh kehidupan modern/global yang datang dari segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Istilah pesantren tradisional digunakan untuk menunjukkan cirri-ciri dasar perkembangan pesantren yang masih bertahan dan dipercaya pada corak generasi pertama, dan untuk membedakan dengan

sejumlah pesantren yang telah melakukan penyesuaian dengan lembaga-lembaga yang mengklaim dirinya sebagai "pesantren modern". Dari satu sisi, pesantren tradisional terkenal atau cenderung mempertahankan kegunaan metode pembelajaran tradisional namanya sorogan dan bandongan. Dimana kedua metode ini dalam pelaksanaan belajarnya kiyai aktif dan santri pasif. Secara teknis model sorogan bersifat individu, dimana santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari, sedangkan model bandongan lebih bersifat pengajaran klasikal, yaitu santri mengikuti pelajaran dengan duduk sekeliling kiyai yang menerangkan pelajaran secara kuliah dan terjadwal.

Kiyai sebagai pembaca dan penterjemah, bukanlah sekedar membaca teks, melainkan juga memberi pandangan-pandangan pribadi, baik mengenai isi maupun bahasanya. Kedua metode ini sering di-

kritisi sebagai terlalu statis dan tradisional. Atau sebagai metode pembelajaran yang mengharuskan para santri diam dan pasif dan tidak berani berbeda pendapat. Kondisi pesantren sebagaimana yang tergambar diatas banyak berkembang di Bangkalan terutama pada pondok putri, mereka masih lebih fanatic dan percaya kepada pengelolaan pondok tradisional. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pondok khususnya terhadap kiyainya masalah sistem pendidikan masih nomer duanya. Oleh karenanya maka banyak masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya untuk menenjam pendidikan dipondok pesantren.

Para orang tua santriwati mempunyai keinginan bahwa setelah putrinya keluar dari pondok pesantren akan menjadi anak yang solehah dan menjadi sur tauladan didalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya kita lihat jumlah santriwati yang ada di lima pondok pesantren putri dibawah ini:

Tabel 4.1:
Jumlah Santriwati Berdasarkan Pondok Pesantren

No.	Nama Pondok Pesantren	Jumlah/tahun
1.	Al-Hidayah II	260 Orang
2.	Nurul Holil	200 Orang
3.	Syaina Cholil 1	250 Orang
4.	Syaina Cholil 2	250 Orang
5.	Al-Mansyuriyah	200 Orang
	Jumlah	1.160 orang

Upaya Peningkatan Kualitas Melalui Pemberdayaan.

Tuntutan tentang meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada saat ini sudah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dibiarkan berlarut larut. Kemajuan disegala bidang membuat para perempuan harus bisa berupaya untuk menyesuaikan diri dengan kaum laki-laki agar supaya dapat berperan lebih aktif dan baik dalam masyarakat.

Dalam kehidupan pondok pesantren putri yang mana pada dasarnya mereka perlu peningkatan pendidikan yang setara agar mereka dapat lebih berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya program pemberdayaan sangat perlu digalakkan agar sisi-sisi kehidupan mereka dapat tersentuh dan bermafaat. Sedangkan program pemberdayaan yang tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Program pelatihan merupakan cara yang paling ampuh untuk meningkatkan ketrampilan para santriwati atau juga bias dilakukan dengan cara penyeteraan agar peningkatan pendidikan yang berkualitas dapat dikmati oleh kaum perempuan khususnya santriwati yang ada di pondok pesantren putri di Kabupaten Bangkalan.

Harapan-harapan Dalam Proses Pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan melalui kuestioner pada umumnya mereka menjawab seperti yang tertera dalam table berikut :

Tabel 4.1 : Harapan Santriwati Dalam Meningkatkan Kualitasnya.
(*Table 4.1. Santriwati Expection on Repairing on Their Quality*)

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pendidik	300 Orang
2.	Wiraswasta/usaha	270 Orang
3.	Pemda/PNS	109 Orang
4.	Perawat	271 Orang
5.	Ibu Rumah Tangga	210 Orang
	Jumlah	1.160 Orang

Dengan melihat data diatas maka membuktikan bahwa para santriwati ingin berperan aktif dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Dimana pilihan yang paling banyak dari para santriwati adalah sebagai pendidik yaitu sebanyak 300 orang. Hal ini menunjukkan bahwa naluri sebagai seorang wanita tidak lepas dari keinginannya. Pilihan terbanyak kedua jatuh pada jenis pekerjaan sebagai perawat yaitu sebanyak 271 orang. Berarti bahwa bidang kesehatan juga tidak lepas dari perhatian dari para santri dimana terbukti mereka juga sangat tertarik dalam bidang keperawatan.

Pilihan ketiga jatuh pada jenis pekerjaan sebagai wiraswasta/ wirausaha, di mana dunia ini kental dengan jiwa pedagang orang Madura yaitu sebanyak 270

orang. Pilihan keempat pada jenis pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yaitu cukup banyak sesuai dengan nalurnya sebagai wanita yaitu sebanyak 210 orang dan yang terakhir sebagai pegawai negri sipil (PNS) hanya 109 orang.

Hambatan-hambatan Dalam Pemberdayaan Santriwati Dalam Bermasyarakat

Pada dasarnya santriwati yang ada di Kabupaten Bangkalan berada pada tingkat ekonomi menengah kebawah dan latar belakang pendidikan rendah. Kondisi semacam itu dapat mempengaruhi efektifitas pemberdayaan santriwati dalam bermasyarakat. Disamping masalah ekonomi dan pendidikan masalah kondisi social, budaya, agama, serta keluarga keluarga sangat besar pengaruhnya dalam melakukan program pemberdayaan terhadap santriwati yang ada di Bangkalan.

Untuk lebih jelasnya mari kita lihat kondisi struktur ekonomi keluarga para santriwati berdasarkan pekerjaanya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2: Latar Belakang Pekerjaan Orang Tua Santriwati di Bangkalan.
(*Table 4.2. The Job Background of Santriwati Parent In Bangkalan*)

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pendidik	120 Orang
2.	Wiraswasta/usaha	455 Orang
3.	Pemda/PNS	58 Orang
4.	Petani	314 Orang
5.	Dan lain-lain	213 Orang
	Jumlah	1.160 orang

Dengan melihat table diatas dapat diketahui bahwa orang tua dari santrwati sebagian besar adalah sebagai wiraswasta/ usaha yaitu sebanyak 455 orang sedangkan sebagai petani sebanyak 314 orang dan lain-lain seperti sopir, TKI, Berlayar dan sebagainya sebanyak 213 orang, sebagai pendidik sebanyak 120 orang terakhir

sebagai pegawai negeri sipil hanya 58 orang.

Latar belakang pekerjaan dan ekonomi wali santri yang dapat dilihat dalam table diatas maka dengan jelas bahwa kurang bisa mendukung program pemberdayaan perempuan khususnya santriyati yang ada di pondok pesantren Kabupaten Bangkalan kurang mendapat perhatian.

KESIMPULAN

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lima pondok putrid yang ada di kabupaten Bangkalan menggambarkan bahwa minat para santriyati di Bangkalan terhadap peningkatan kualitas melalui pemberdayaan perempuan sangatlah tinggi. Ada beberapa jabatan atau pekerjaan yang diinginkan dan diminati para santriyati didalam pembangunan masyarakat Bangkalan seperti, keperawatan, pendidik, pengusaha, pegawai negeri dan ibu rumah tangga.
- b. Pandangan para santriyati di Bangkalan terhadap upaya pemberdayaan perempuan sangat positif dan konstruktif sehingga dapat berperan aktif dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah agama yang telah dipelajari di pondok pesantren. Dalam rangka peningkatan kualitasnya mereka sangat antusias namun banyak kendala-kendala yang harus dihadapi antara lain: kemampuan (skill) terbatas, ekonomi, pengetahuan, budaya, agama dan lingkungan keluarga yang sangat dan perlu diperhatikan sehingga program program pemberdayaan dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrahini Irawati, S. dkk, *Eksistensi Politisi Wanita Terhadap Kuota 30% di DPRD di Pulau Madura ditinjau dari Kualitas Sumber Daya Manusia*, Riset Dosen Muda, Tahun 2005 tidak dipublikasikan.
- Boserup E, 1984, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- CETRO (Centre For Electoral Reform). 2002. "Data dan Fakta Keterwakilan Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif, 1999-2001" (Ringkasan Eksekutif). Jakarta: Divisi Perempuan dan Pemilu. 8 Maret (tidak diterbitkan).
- Dita Indah Sari, *Buruh Perempuan: Kemanusiaan dan Produktivitas yang Sia-sia*, www.jurnalperempuan.com
- Fakih M, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lies Markus, *Hak Perempuan*, www.ranesi.nl.
- Lindsey LL, 1990, *Gender Role: a Sociological Perspective*, New Jersey : Prentice Hall.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*,
- Nasution S, 1988, *Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Nye IF, 1976, *Role Structure and Analysis of the Family*, California : Sage Library of Social Research.
- Pudjiwati S, 1993, *Peran Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saptari R, 1997, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Grafiti.
- Tavris C, 1992, *Mismeasure of Woman*, New York : Touchstone.
- Usman S, 1998, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Yogyakarta* Pustaka Pelajar.
- Inpres No. 9 Tahun 2000